

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA REFORMASI

Rismawati

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila- sila pancasila merupakan suatu system nilai, oleh karena itu sila- sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai- nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun kesemuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis. Konsekuensinya realisasi maupun aktualisasi setiap sila atau derivasi setiap sila senantiasa dalam hubungan yang sistematis dengan sila- sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila- sila Pancasila yang berisi nilai nilai yang menjadi ideologi bangsa Indonesia dan sumber pedoman masyarakat Indonesia perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kita . Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan Das sollen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diaktualisasikan agar menjadi kenyataan atau das Sein

Kata kunci : *Aktualisasi Pancasila, Kehidupan berbangsa dan bernegara*

PENDAHULUAN

Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita- cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Bangsa yang hidup dalam kawasan suatu Negara bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut **Ernest Renan dan Hans Khons** sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pembaruan maka harus mendasar pada suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan dalam tujuan pengaplikasian, perelesasian maupun pengaktualisasian yang didasarkan pada nilai- nilai Pancasila.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan Negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu di era reformasi dimana demokrasi dibolehkan. Hal ini menyebabkan dinamika kehidupan

berbangsa dan bernegara memiliki banyak tantangan dan dianggap merusak kepribadian bangsa, untuk itulah peran Pancasila di era ini, demokrasi yang berasaskan kebebasan perlu dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bersama dalam Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai yang ada pada Pancasila, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia berkewajiban untuk saling menjaga keharmonisan melalui aktualisasi dalam nilai-nilai Pancasila

PEMBAHASAN

Aktualisasi Terhadap keberadaan Nilai- Nilai Pancasila

Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Aktualisasi Pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

a) Pengertian Aktualisasi Pancasila terhadap keberadaan nilai- nilai Pancasila

Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan pengaktulisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materials. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai- nilai Pancasila merupakan filsafat (Pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai- nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai- nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa(Lihat Darmodiharjo,1996).

Selama bangsa Indonesia memiliki kehendak bersama untuk membangun bangsa di atas dasar nilai- nilai Pancasila, yang diistilahkan pancasila sebagai Paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berisi asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi

teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai dan sumber hukum sehingga Pancasila patut diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Macam- macam Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :

1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang – bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang – undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila Subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang obyektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang obyektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan

tingkah – laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma – norma moral.

Aktualisasi Pancasila dalam Aspek Kehidupan di Era Reformasi

Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai macam era termasuk era reformasi. Pancasila dengan nilai- nilainya harus diaktualisasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai berikut :

a) Bidang Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV “..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasi pancasila.

Globalisasi di era reformasi merupakan sekutu masyarakat dan bukan lawan seperti terkesan selama ini. Tetapi perlu diingat pula bahwa setiap agenda politik Indonesia di era reformasi dalam menghadapi era globalisasi harus sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Selama ini, sedang gencar-gencarnya Negara maju dalam melakukan politik luar negerinya yang selalu mengintervensi Negara lain dengan tujuan tertentu. Misalnya, menyangkut eksploitasi sumber daya alam di Freeport, pertambangan Blok Cepu, dan tempat-tempat yang melalui agenda politiknya. Selain itu, terjadi intervensi politik berkaitan dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, terorisme, lingkungan hidup yang justru merugikan negara kuat.

Oleh karena itu, sebagai pengamalan dari Pancasila Indonesia perlu memosisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan Negara lain. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-citadan tujuan negara. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan

keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke permukaan. Berbagai macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau penjara 150 tahun bagi yang terbukti. Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saat ini, pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap. "Take it or Die" atau lebih dikenal dengan istilah "The Death of Government". Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management.

b) Bidang Ekonomi

Seiring dengan kemajuan teknologi Informasi yang menghadirkan kemudahan dalam melakukan akses informasi, aktifitas perekonomian berkembang pesat melampaui batas Negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk pasar bebas. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan adanya aliansi-aliansi ekonomi seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union (EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang ketat, mendorong setiap negara mendorong mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif.

Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus

berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Adapun Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang meliputi :

1. ekonomika etik dan ekonomika humanistic
2. nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi
3. ekonomi berkeadilan sosial.

Seorang pengamat Ekonomi Indonesia, **Prof. Laurence A. Manullang**, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berbagai resep telah dibuat untuk menyembuhkan penyakit utang Internasional, tetapi hampir disepakati bahwa langkah pengobatan yang diterapkan pada krisis utang telah gagal. Fakta yang menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan (kecanduan) yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri. Sampai sejauh ini belum ada resep yang manjur untuk bisa keluar dari belitan utang. Penyebabnya adalah berbagai hambatan yang melekat pada praktik yang dijalankan dalam sistem pinjaman internasional, tepatnya negara-negara donor.

Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan agraris, telah menciptakan masalah baru bagi national economic development. Bahkan menurut sebagian pakar langkah Orde baru dinilai sebagai langkah spekulatif seperti mengundi nasib, pasalnya, masyarakat Indonesia yang sejak dahulu berbasis agraris Sebagai konsekuensinya, hasil yang didapat, setelah 30 tahun dicekoki ideologi 'ekonomisme' itu justru kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin merosot tajam (dekadensia).

Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan cenderung dualisme, antara kemandirian (ketergantungan) pemerintah kepada IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat yang tersebar (diversity of economy style) di seluruh pelosok negeri tidak tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabui masyarakat dengan raskin (beras untuk rakyat miskin), atau jaring

pengaman sosial (JPS) lain yang selalu salah alamat. Apalagi dengan dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang dilain pihak menguntungkan pihak-pihak yang bermodal besar, akan tetapi di sisi lain sangat merugikan pihak-pihak kecil yang tidak mampu bersaing dengan Negara luar.

c) Bidang Sosial Budaya

Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan, dalam bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini dipertahankan. Sikap yang harus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan sosial budaya.

Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek SARA, tetapi dimasa yang akan datang kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi dan profesionalisme individu atau kelompok. Sehingga kontribusi profesi individu/kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi.

Ini menunjukkan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia.

d) Bidang Hukum

Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku didalamnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan

elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD '45. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang.

Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi terutama dalam era reformasi sekarang ini yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jati diri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain:

1. Perdamaian—bukan perang.
2. Demokrasi—bukan penindasan.
3. Dialog—bukan konfrontasi.
4. Kerjasama—bukan eksploitasi.
5. Keadilan—bukan standar ganda.

Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Di era reformasi seperti sekarang ini, begitu banyak tantangan yang telah, sedang dan yang akan dihadapi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa sehingga pengaplikasian melalui nilai-nilai Pancasila dengan mengikutsertakan kesadaran warga negara perlu ada dan harus ditanamkan disetiap jiwa-jiwa generasi penerus bangsa, karena kesadaranlah input yang paling kecil namun hal yang paling utama dalam melakukan suatu perbaikan dengan output yang sangat besar.

KESIMPULAN

Sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki dasar Negara Pancasila. Tentu saja wajib mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga Negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Dilain pihak , Apatisme dan resistensi dan penyimpangan terhadap nilai- nilai Pancasila bisa diminimalisir. Di era reformasi yang menjunjung tinggi nilai- nilai Demokrasi tentu sangat besar pengaruhnya terhadap nilai- nilai Pancasila. Dimana ketika kita ingin berdemokrasi, tentu kita harus melihat dulu apakah yang akan kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan nilai- nilai pancasila.

Berdasarkan berbagai fenomena tentang aktualisasi terhadap nilai- nilai Pancasila di era reformasi saat ini, kita seharusnya jangan membiarkan negara kita terus terpuruk. Kita harus mengaktualisasikan nilai – nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita masing – masing. Kita jangan hanya menjadi penonton ulung, yang hanya mampu mengkritik, janganlah kita menjadi pembaca – pembaca yang baik, tapi kita harus mewujudkannya good govermance dalam setiap kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Sri Rahayu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015

<http://indrie7.blogspot.in/2013/04/aktualisasi-pancasila-dan-aktualisasi.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

<https://anastasiarenepuspita.wordpress.com/2015/04/20/aktualisasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-di-era-globalisasi/>